

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

THE ANALYSIS OF GOVERNMENTAL FINANCIAL PERFORMANCE OF PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Wong Marlany Merry Wongindaan

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: laniwongindaan@gmail.com*

ABSTRAK

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan suatu entitas pelaporan yang wajib menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut dapat menjadi landasan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud. Jenis penelitian dalam studi ini adalah Penelitian Pragmatis dan menggunakan metode analisis Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Rasio Pertumbuhan PAD pada periode Tahun 2011 – 2015 menunjukkan Kabupaten Kepulauan Talaud pada periode tersebut mengalami pertumbuhan positif, Rasio Efektifitas PAD pada periode Tahun 2012 – 2015 mengindikasikan PAD rasio efektifitas bisa dikatakan cukup efektif, Rasio Belanja Operasi dan Modal PAD pada Tahun 2012 - 2014 menunjukkan perubahan. Saran-saran penelitian ini adalah meningkatkan PAD dari penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, memaksimalkan realisasi PAD, memprioritaskan alokasi belanja operasi pada pembangunan daerah yang dibutuhkan dan memaksimalkan alokasi belanja modal aset tetap dari pemerintah daerah.

Kata kunci : Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Penelitian Pragmatis.

ABSTRACT

Talaud Islands Regency is one reporting entity that obliges to construct financial report. Later, this financial report can become basic for conducting assessment to financial report of this region government. This research's objective is to analyze the governmental financial performance of Talaud Islands Regency. Research type in this study is Pragmatic Research and is using analysis method Descriptive Analysis. Its' result has concluded that PAD Growth Ratio at 2011 – 2015 period shows Talaud Islands Regency at this period is in positive growth, PAD Effectiveness Ratio 2012 – 2015 period indicate this ratio is effective enough, PAD Operational and Capital Expenditure Ratios at 2012 - 2014 shows change. This research's suggestions are increasing PAD from Regional Taxes and Retribution Earning, maximizing PAD realization, Prioritizing operational expenditure allocation at essential regional development and maximizing capital expenditure allocation on fixed assets for regional government.

Keywords : Financial Report, Financial Performance, Pragmatic Research.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Prinsip dari desentralisasi fiskal adalah *money follow functions*, dimana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pada tahun 2010 terbit PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP No. 24 tahun 2005. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 mempunyai komponen laporan keuangan dan struktur Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. komponen laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 sebagai berikut, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan laporan arus kas.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tinjauan Pustaka Akuntansi Secara Umum

Pengertian Akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengolah, mengklasifikasi dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya (Keputusan Menteri Keuangan).

Menurut *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)*, yang dikutip oleh Bekaoui (2006) akuntansi merupakan, "Suatu seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya". Menurut Warren *et. al.* (2010), secara umum akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Indonesia

Sistem akuntansi adalah sistem yang dapat menyajikan informasi untuk digunakan dalam hubungan bisnis dan pelaporan pemilik, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sistem akuntansi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan manajemen untuk menyajikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak diluar organisasi sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. (Fees dan Warren, 1990, dikutip oleh Halim, 2010). Dalam PP No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Dengan demikian, sistem akuntansi

pemerintah adalah sistem pencatatan yang dapat menghasilkan informasi keuangan untuk tujuan intern pemerintah bahkan untuk tujuan luar organisasi.

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Pemerintah secara bertahap telah melaksanakan perubahan yang mendasar mengenai pengelolaan keuangan negara. Hal ini ditandai dengan disahkannya tiga UU di bidang keuangan negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan negara). Seiring dengan disahkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, definisi keuangan negara yang saat ini digunakan harus mengacu kepada peraturan perundangan tersebut. Menurut pasal 1 ayat 1 UU tersebut keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Arti dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara mempunyai arti luas dan sempit. Pengelolaan keuangan negara dalam arti luas adalah manajemen keuangan negara. Dalam arti sempit pengelolaan keuangan negara adalah administrasi keuangan negara atau tata usaha keuangan negara. Tujuan pengelolaan keuangan negara secara umum adalah agar daya tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang semakin bersifat global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Adapun yang menjadi arti penting/alasan mengapa keuangan negara harus dikelola dengan baik, adalah karena keuangan negara dapat digunakan untuk maksud-maksud berikut: Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, Menjaga stabilitas ekonomi, Merealokasi sumber daya ekonomi, dan Meretribusi pendapatan.

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara dikenal adanya beberapa azas yang sudah lazim digunakan selama ini yaitu azas tahunan, universalitas, spesialisitas, dan kesatuan. Azas-azas yang dimaksud yaitu sebagai berikut (Mursyidi, 2010): Akuntabilitas berorientasi pada hasil, Profesionalitas, Proporsionalitas, Keterbukaan, dan Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Definisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Modul Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua (2014) mencatat bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.05/2013 mendefinisikan kebijakan akuntansi pemerintah pusat sebagai prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat disusun dalam rangka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua di lingkungan pemerintah pusat.

Tujuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Modul Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua (2014) menjabarkan bahwa dua (2) tujuan utama dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan Bendahara Umum

Negara (BUN), dan laporan keuangan kementerian negara/lembaga dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas pelaporan.

2. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat.

Keterkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi, Laporan Keuangan, dan Bagan Akun Standar

Modul Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua (2014: 5-6) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Atas dasar Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat (PSAP) tersebut, ditambah dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAS), serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan pemerintah yang terkait dengan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, maka disusunlah kebijakan akuntansi pemerintah pusat yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam rangka menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, diperlukan suatu sistem akuntansi yang merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan.

Kebijakan Laporan Keuangan Kerangka Dasar Kebijakan Laporan Keuangan

Modul Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua (2014) mencatat bahwa tiga belas (13) kerangka dasar dari Kebijakan Laporan Keuangan dijabarkan sebagai berikut: Tujuan Laporan Keuangan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan, Komponen Laporan Keuangan, Bahasa Laporan Keuangan, Mata Uang Pelaporan, Kebijakan akuntansi, Penyajian Laporan Keuangan, Konsistensi, Materialitas dan Agregasi, Periode Pelaporan, Informasi Komparatif, Laporan Keuangan Interim, dan Laporan Keuangan Konsolidasian.

Komponen Laporan Keuangan

Modul Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua (2014) menyatakan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari poin-poin berikut ini: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Keuangan Daerah

Batafor (2011) menyatakan bahwa faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Usman (1998), mengatakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “*self supporting*” dalam bidang keuangan.

Laporan Keuangan Daerah

Batafor (2011) menjabarkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun/dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Namun, mengingat SDM daerah yang masih sangat minim yang berspesialis di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan sektor publik, maka akan lebih tepat kalau menggunakan sistem aplikasi komputer yang komprehensif dan sudah teruji. Hal ini akan dapat meminimalkan kesalahan proses akuntansi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Adapun ciri-ciri kualitas laporan keuangan yang bagus meliputi relevan, handal (*reliable*), lengkap dan komprehensif (*complete*), serta dapat diperbandingkan (*comparable*).

Kinerja Keuangan Daerah

Batafor (2011) menjabarkan bahwa kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dapat dikatakan sangat buruk.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan pragmatis. Suryana (2010) mencatat bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Apabila, diambil beberapa sampelnya saja, disebut survei deskriptif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Melonguane Talaud. dan waktu penelitian dimulai dari bulan April-Juni 2016.

Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, prosedur penelitian yang akan dijalankan saat ini dijabarkan pada 3 (tiga) poin berikut: Perumusan Masalah, Pengambilan Data dan Penarikan Kesimpulan.

Metode Analisis Data

Kuncoro (2011) berdasarkan metode penelitian yang dilakukan, terdapat salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang merupakan pengumpulan data dan menguraikan atau menyangkut pertanyaan mengenai fenomena subjek penelitian. Dalam menganalisis data yang terkumpul penulis menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi.

Rasio Analisis Data

Perhitungan ini menggunakan analisis berupa rasio keuangan sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas. Rasio ini dihitung dengan rumus berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Tabel 1. Efektivitas Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat efektif	> 100
Efektif	100
Cukup efektif	90 – 99
Kurang efektif	75 – 89
Tidak efektif	< 75

Sumber: Mahmudi (2010)

2. Rasio Keserasian. Rasio ini dihitung dengan 2 (dua) rumus berikut:

1. Rasio Belanja Rutin/Operasi

Rasio ini dihitung dengan rumus berikut.

$$\text{Rasio Belanja Rutin/Operasi} = \frac{\text{Belanja Rutin/Operasi}}{\text{Total APBD}}$$

2. Rasio Belanja Modal. Rasio ini dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$$

3. Rasio Pertumbuhan. Rasio ini dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD } t1 - \text{PAD } t0}{\text{PAD } t0}$$

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Menurut Kuncoro (2011) jenis data dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut.

1. Data Kualitatif adalah data yang dapat diukur dalam skala numerik.
2. Data Kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka), yang dapat dibedakan menjadi data interval (data yang diukur dengan jarak antara dua titik pada skala yang sudah diketahui) dan data rasio (data yang diukur dengan suatu proporsi).

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data Laporan Arus Kas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sumber Data

Menurut Kuncoro (2011) sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer, biasanya diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinil.
2. Data sekunder, biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam LAK (Laporan Realisasi Anggaran).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Rasio Pertumbuhan

Tabel 2 mencantumkan perhitungan Rasio Pertumbuhan dari Kabupaten Kepulauan Talaud dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

Tabel 2. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3
	1	2	
2011	7.000.158.000,00		
2012	8.925.095.908,00	1.924.937.908,00	0,27498
2013	9.825.767.183,00	900.671.275,00	0,10091
2014	21.200.055.145,00	11.374.287.962,00	1,15760
2015	27.753.185.578,00	6.553.130.433,00	0,30911

Sumber: Data Olahan, 2016

Rasio Efektifitas

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efektifitas Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD			Target Penerimaan PAD			7
	1	2	3	4	5	6	
2011	398.412.576.407,00			394.587.944.061,49			1,00969
2012	465.434.017.526,00	67.021.441.119,00	0,16822	461.136.463.329,00	66.548.519.267,51	0,16865	1,00932
2013	563.438.261.437,00	98.004.243.911,00	0,21057	558.677.647.287,00	97.541.183.958,00	0,21152	1,00852
2014	628.733.790.996,00	65.295.529.559,00	0,11589	654.051.882.823,00	95.374.235.536,00	0,17071	0,96129
2015	681.510.297.084,00	52.776.506.088,00	0,08394	691.753.730.680,00	37.701.847.857,00	0,05764	0,98519

Sumber: Data Olahan, 2016

Rasio Belanja Operasi

Tabel 4. Perhitungan Rasio Belanja Operasi Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015

Tahun	Belanja Operasi			Total APBD			7
	1	2	3	4	5	6	
2011	311.147.169.883,00			40.363.522.181,50			7,70862
2012	379.688.788.249,00	68.541.618.366,00	0,22029	38.518.263.929,50	-1.845.258.252,00	-0,04572	9,85737
2013	441.334.144.101,00	61.645.355.852,00	0,16236	46.990.484.981,00	8.472.221.051,50	0,21995	9,39199
2014	449.276.151.890,00	7.942.007.789,00	0,01800	91.064.182.824,00	44.073.697.843,00	0,93793	4,93362
2015	439.376.774.437,00	-9.899.377.453,00	-0,02203	66.482.578.735,00	-24.581.604.089,00	-0,26994	6,60890

Sumber: Data Olahan, 2016

Rasio Belanja Modal

Tabel 5 mencantumkan perhitungan Rasio Belanja Modal dari Kabupaten Kepulauan Talaud dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

Tabel 5. Perhitungan Rasio Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015

Tahun	Belanja Modal			Total APBD			7
	1	2	3	4	5	6	
2011	62.651.657.815,00			40.363.522.181,50			1,55219
2012	80.457.762.533,00	17.806.104.718,00	0,28421	38.518.263.929,50	-1.845.258.252,00	-0,04572	2,08882
2013	108.694.342.928,00	28.236.580.395,00	0,35095	46.990.484.981,00	8.472.221.051,50	0,21995	2,31311
2014	126.191.337.279,00	17.496.994.351,00	0,16097	91.064.182.824,00	44.073.697.843,00	0,93793	1,38574
2015	189.373.812.726,00	63.182.475.447,00	0,50069	66.482.578.735,00	-24.581.604.089,00	-0,26994	2,84847

Sumber: Data Olahan, 2016

Pembahasan

Rasio Pertumbuhan

Nilai Rasio Pertumbuhan Pada periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 dan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 dari Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan keberhasilan kabupaten ini dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 27,498%, 10,091%, 115,760% dan 30,911% dan diperoleh dari hasil pembagian selisih jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya dengan Pendapatan Asli Daerah tahun sesudahnya dengan Jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya. Maka bisa dikatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun ini mengalami pertumbuhan yang positif.

Rasio Efektifitas

Keseluruhan nilai Rasio Efektifitas dari Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan peningkatan dan penurunan nilai perbandingan tersebut dari periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan kabupaten ini mempunyai efektifitas penggunaan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi.

Rasio Belanja Operasi

Pada Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015, nilai Rasio Belanja Operasi dari Kabupaten Kepulauan Talaud adalah 770,862%, 985,737%, 939,199%, 493,362% dan 660,890% dan didapatkan dari hasil pembagian jumlah Belanja Operasi dari Kabupaten Kepulauan Talaud pada satu tahun analisis dengan jumlah Total APBD pada tahun yang sama.

Rasio Belanja Modal

Pada Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015, nilai Rasio Belanja Modal dari Kabupaten Kepulauan Talaud adalah 155,219%, 208,882%, 231,311%, 138,574% dan 284,847% dan didapatkan dari hasil pembagian jumlah Belanja Modal dari Kabupaten Kepulauan Talaud pada satu tahun analisis dengan jumlah Total APBD pada tahun yang sama.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data di bab sebelumnya, maka kesimpulan-kesimpulan utama dalam penelitian ini adalah

1. Rasio Pertumbuhan PAD pada periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp 1.924.937.908,00, Rp 900.671.275,00, Rp 11.374.287.962,00 dan Rp 6.553.130.433,00 dan menunjukkan Kabupaten Kepulauan Talaud pada periode tersebut mengalami pertumbuhan yang positif.
2. Rasio Efektifitas PAD pada periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan jumlah Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Kabupaten Kepulauan Talaud meningkat sebesar Rp. 67.021.441.119,00, Rp 98.004.243.911,00, Rp 65.295.529.559,00 dan Rp 52.776.506.088,00 dan mengindikasikan PAD rasio efektifitas bisa dikatakan cukup efektif karena berada pada atau di atas 90-99%.
3. Rasio Belanja Operasi PAD pada Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014 menunjukkan jumlah Belanja Operasi meningkat sebesar Rp. 68.541.618.366,00, Rp 61.645.355.852,00 dan Rp 7.942.007.789,00 dan pada Tahun 2015, jumlah Belanja Operasi menurun sebesar Rp 9.899.377.453,00; pada Tahun 2012 dan Tahun 2015, jumlah Total APBD menurun sebesar Rp 1.845.258.252,00 dan Rp 24.581.604.089,00 dan pada Tahun 2013 dan Tahun 2014, jumlah Total APBD meningkat sebesar Rp 8.472.221.051,50 dan Rp 44.073.697.843,00; dan nilai Rasio ini dari Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami perubahan.
4. Rasio Belanja Modal PAD pada Tahun sampai dengan Tahun 2015, Jumlah Belanja Modal dari Kabupaten Kepulauan Talaud Sesudah Realisasi Anggaran Pendapatan meningkat sebesar Rp. 17.806.104.718,00, Rp 28.236.580.395,00, Rp 17.496.994.351,00 dan Rp 63.182.475.447,00; pada Tahun 2012 dan Tahun 2015, jumlah Total APBD dari Kabupaten Kepulauan Talaud menurun sebesar Rp 1.845.258.252,00 dan Rp 24.581.604.089,00 dan pada Tahun 2013 dan Tahun 2014, jumlah Total APBD dari Kabupaten Kepulauan Talaud meningkat sebesar Rp 8.472.221.051,50 dan Rp 44.073.697.843,00; dan nilai Rasio ini dari Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami perubahan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di bab sebelumnya, dua (2) poin utama yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan PAD dari penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, agar supaya Rasio Pertumbuhan PAD dari Kabupaten Kepulauan Talaud akan selalu berada pada pertumbuhan positif.
2. Memaksimalkan realisasi PAD, agar supaya Rasio Efektifitas PAD dari Kabupaten Kepulauan Talaud akan menjadi sangat efektif.
3. Memprioritaskan alokasi belanja operasi pada pembangunan daerah yang dibutuhkan, agar supaya Rasio Belanja Operasi PAD dari Kabupaten Kepulauan Talaud akan menjadi optimal.
4. Memaksimalkan alokasi belanja modal aset tetap dari pemerintah daerah, agar Rasio Belanja Modal PAD dari Kabupaten Kepulauan Talaud akan menjadi efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA***Buku***

- [1] Belkaoui, Ahmad Riahi (2006 : 55). Teori Akuntansi Buku 1 Edisi 5. Penerbit Salemba Empat.
- [1] Fess, Philip E., Reves, James M dan Warren, Carl S. (1990). Accounting Principles edisi 16. Penerbit Cincinnati, South-Western.
- [1] Halim, Abdul. (2002 : 189). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama , Salemba Empat, Jakarta.
- [1] Halim, Abdul. (2010 : 7). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah edisi 4. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- [1] Kuncoro, Mudrajad (2011). Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- [1] Mahmudi. (2010 : 142) Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Erlangga Jakarta
- [1] Modul Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua. (2014). Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2014.
- [1] Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah.
- [1] Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- [1] Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- [1] Warren *et. Al* (2010:10). Pengantar Akuntansi, Adaptasi Indonesia (Principles of Accounting, Indonesia Adaptation), Jilid 2. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Tesis

- [1] Batafor, Gregorius Gehi. (2011). Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata – Provinsi NTT. Tesis. Program PascaSarjana, Universitas Udayana, Denpasar.